



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 32/SK-BUP/HK/2026
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA: Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari Perangkat Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, atau berdasarkan evaluasi ternyata tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan perubahan atas Keputusan ini;
- KETIGA: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Januari 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, S.H.
NIP 197806052002121002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 32/SK-BUP/HK/2026, TANGGAL 14 JANUARI 2026
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

NO	JUDUL	PERANGKAT DAERAH
1	Program RT-Ku Terbaik	DPMD
2	Pendamping Dedikasi Kukar Idaman Terbaik (Pendekar Idaman)	DPMD
3	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa	DPMD
4	Pemilihan Kepala Desa	DPMD
5	Alokasi Dana Desa Tahun 2027	DPMD
6	Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2027	DPMD
7	Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2027	DPMD
8	Pembentukan Desa Persiapan Loa Janan Raya di Kecamatan Loa Janan	DPMD
9	Pembentukan Desa Persiapan Bakungan Ulu di Kecamatan Loa Janan	DPMD
10	Pembentukan Desa Persiapan Pariaman Makmur di Kecamatan Tenggaraong Seberang	DPMD
11	Pembentukan Desa Persiapan Jantur Raya di Kecamatan Muara Muntai	DPMD
12	Pembentukan Desa Persiapan Malong di Kecamatan Kenohan	DPMD
13	Pembentukan Desa Persiapan Pengempang di Kecamatan Muara Badak	DPMD
14	Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)	DPMD
15	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Aset Desa	DPMD
16	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2028 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD
17	Perjalanan Dinas Desa	DPMD
18	Pembangunan Kawasan Perdesaan Agroekowisata Separi Sejahtera	DPMD

NO	JUDUL	PERANGKAT DAERAH
19	Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kab Kutai Kartanegara	DPMPTSP
20	Kredit Kukar Idaman Terbaik	Bagian Perekonomian
21	Perubahan Perbup Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Afirmasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum
23	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Marangkayu 2026-2045	DPPR
24	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sebulu 2026-2045	DPPR
25	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Bangun Darat 2026-2045	DPPR
26	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Anggana 2026-2045	DPPR
27	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kembang Janggut 2026-2045	DPPR
28	Garis Sepadan	DPPR
29	Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa	DPPR
30	Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Dinkes
31	Penanggulangan Tuberkulosis	Dinkes
32	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinkes
33	Pola Karir	BKPSDM
34	Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi anaman dan atau Benda-Benda lain yang berkaitan dengan Tanah atau Kerugian yang dapat dinilai di Wilayah Kab Kukar	Tata Pemerintahan
35	Pedoman Penyelenggaraan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tata Pemerintahan
36	Peta Desa Tanjung Limau Kec Muara Badak	Tata Pemerintahan
37	Peta Desa Jantur Selatan Kec. Muara Muntai	Tata Pemerintahan
38	Peta Desa Lamin Telihan Kec. Kenohan	Tata Pemerintahan
39	Peta Desa Semangko Kec. Marangkayu	Tata Pemerintahan
40	Pembangunan Ketahanan Keluarga	DPPKB
41	Kode Etik Aparatur Sipil Negara	BKPSDM/Bag Umum
42	Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara	BKPSDM/Bag Umum
43	Pedoman Penanggulangan Malaria	Dinas Kesehatan
44	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan

NO	JUDUL	PERANGKAT DAERAH
45	Peraturan Internal RSUD Aji Muhammad Parikesit	Dinas Kesehatan
46	Peraturan Internal RSUD Dayaku Raja	Dinas Kesehatan
47	Penetapan Besaran Insentif Peserta Wajib Kerja Dokter Speasialis pada RSUD Dayaku Raja	Dinas Kesehatan
48	Peraturan Internal RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Dinas Kesehatan
49	Peta Batas Kelurahan Sanga Sanga Dalam Kec. Sanga Sanga	Bag. Tata Pemerintahan
50	Peta Batas Kelurahan Sari Jaya Kec Sanga Sanga	Bag. Tata Pemerintahan
51	Peta batas Desa Kutai Lama Kec Anggana	Bag. Tata Pemerintahan
52	Peta Batas Desa Lung Anai Kec Loa Kulu	Bag. Tata Pemerintahan
53	Peta Batas Desa Anggana Kec Anggana	Bag. Tata Pemerintahan
54	Peta Batas Desa Rebaq Rinding Kec Muara Muntai	Bag. Tata Pemerintahan
55	Pedoman Pemberian Penghargaan kepada ASN	BRIDA
56	Perubahan atas Perbup No 76 tahun 2023 ttg Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	BRIDA
57	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kukar No 77 Thn 2023 ttg Inovasi Daerah	BRIDA
58	Produk Unggulan Daerah	BRIDA
59	Penjabaran APBD TA 2027	BPKAD
60	Penjabaran Perubahan APBD TA 2026	BPKAD
61	Perubahan Penjabaran APBD TA 2026	BPKAD
62	Perubahan Kedua Penjabaran APBD TA 2026	BPKAD
63	Perubahan Ketiga Penjabaran APBD TA 2026	BPKAD
64	Gaji ke-13 dan THR	BPKAD
65	Uang Persediaan	BPKAD
66	Pembukaan dan Penutupan Rekening	BPKAD
67	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025	BPKAD
68	Perubahan Atas Perbup N0 19 Thn 2024 ttg Kebijakan Akuntansi Pemda	BPKAD
69	Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan/atau Perjanjian Pemanfaatan Tanah di atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah	BPKAD
70	Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan	Bag Kesejahteraan Rakyat

NO	JUDUL	PERANGKAT DAERAH
71	Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025	BAPPEDA
72	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Thn 2027	BAPPEDA
73	Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Thn 2027	BAPPEDA
74	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (P-RKPD) Thn 2026	BAPPEDA
75	Perubahan Perbup No. 11 Thn 2013 ttg Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Kab Kukar	BAPPEDA
76	Perubahan Perbup No. 83 Thn 2020 ttg Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tk Daerah	BAPPEDA
77	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Thn 2025-2029	BAPPEDA
78	Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan Agroekowisata Separi Sejahtera 2025-2029	BAPPEDA
79	Pembinaan dan Pengawasan BLUD	Bag Perekonomian
80	Perubahan Perbup No 23 Thn 2025 ttg Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	BAPENDA
81	Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
82	Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi	DPMPTSP
83	Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Mewnengah di Kab Kukar	DPMPTSP
84	Perubahan atas Perbup No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BAPENDA
85	Kredit Kukar Idaman Terbaik	Bag Perekonomian
86	Harga Pangan Lokal Minimum Daerah	Dinas Ketahanan Pangan
87	Pemberian Penghargaan/Apresiasi kepada Guru Mengaji, Imam, Penjaga Rumah Ibadah, Penggali Kubur dan Majelis Taklim	Bag Kesejahteraan Rakyat
88	Program Makan Bergizi Gratis Kukar Idaman Terbaik untuk Lansia dan Balita	Bag Kesejahteraan Rakyat
89	Kelas Jabatan	Bag Organisasi
90	Staf Ahli	Bag Organisasi
91	Penilaian Kinerja Organisasi	Bag Organisasi
92	Tambahan Penghasilan Pegawai	Bag Organisasi

NO	JUDUL	PERANGKAT DAERAH
93	Perubahan Kedua Perbup Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bag Organisasi
94	Satuan Pendidikan	Bag Organisasi
95	Struktur Organisasi dan Tata Kerja	Bag Organisasi
96	Pedoman Penghitungan Harga Ganti Rugi dan/atau Benda-Benda Lain yang berkaitan dengan Tanah atau Kerugian yang Dapat Dinilai	Bag. Tata Pemerintahan
97	Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Thn 2017 ttg Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kab Kukar	Dinas Komunikasi dan Informatika
98	Pedoman Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat di Kab Kukar	Dinas Komunikasi dan Informatika
99	Pedoman Penyelenggaraan Diseminasi Informasi melalui Media Berbayar di kab Kukar	Dinas Komunikasi dan Informatika
100	Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan Kualifikasi Kecil di Kab Kukar	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
101	Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPTD di Dinas Kesehatan	Bag Organisasi
102	Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPTD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bag Organisasi
103	Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPTD di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bag Organisasi
104	Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPTD di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bag Organisasi
105	Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPTD di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Bag Organisasi

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI